

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fauzan, Muhammad, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah "Kajian Tentang hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marbun, SF, dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soehino. 1984. *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono, Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutedi Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht, E. 1964. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112).

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka. (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4).

Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 10).

C. Internet

<http://totoksuharto.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-dan-jenis-usaha->

[pariwisata.html](http://totoksuharto.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-dan-jenis-usaha-pariwisata.html) (diakses pada 05 Oktober 2015, pukul 16.00 WIB).